

ANTARA POLITIK NASIONAL DAN POLITIK LOKAL: IDE MEMINDAHKAN IBU KOTA NEGARA PADA 1950AN

NATIONAL AND LOCAL POLITICS DIALOGUES: THE NOTION OF RELOCATING 'NATIONAL CAPITAL CITY' IN 1950S

Pradita Devis Dukarno, Dana Listiana, Gregorius Andika Ariwibowo

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

E-mail: prad008@brin.go.id

ABSTRACT

This article aims to examine the proposal to relocate the national capital city of Indonesia from Jakarta to Palangka Raya in the 1950s, the era of President Sukarno's administration. Despite the lack of realization of the idea, this study questions why the idea came to the fore, especially because the location of the choice that was originally a village in the middle of nowhere in Kalimantan is not the ideal criterion for a capital city with government-supporting infrastructure. In addition, this study is also important to understand the dynamics in seeing and thinking about social space, especially in the context of state-building because the capital city also serves as a symbol of national identity. To address these issues, this study uses an urban historical approach to delve into the underlying thoughts and socio-political circumstances that influenced the proposal. The findings indicate that the idea stemmed from the political aspiration of central and regional elites during the postcolonial situation, marked by the country's transition from colonial rule to independence, and the potential threat of regional disintegration.

Keywords: *national capital, symbolic space, social space, national identity, cultural identity*

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan gagasan pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Palangka Raya pada periode 1950an, era pemerintahan Presiden Soekarno. Terlepas dari urung terealisasinya gagasan tersebut, studi ini mempertanyakan mengapa gagasan tersebut mengemuka, terlebih karena lokasi pilihan yang semula berupa kampung antah-berantah di Kalimantan bukanlah kriteria ideal sebuah ibu kota dengan infrastruktur penopang pemerintahan. Selain itu, studi ini juga penting untuk memahami dinamika dalam melihat dan memikirkan ruang publik, terutama dalam konteks *state-building* karena ibu kota juga berfungsi sebagai simbol identitas nasional. Untuk mengungkapnya, studi ini menggunakan pendekatan sejarah kota yang menelusur pemikiran di balik gagasan serta situasi sosial-politik pembentuknya. Hasil studi menunjukkan bahwa gagasan tercipta oleh imajinasi politik elite pusat dan daerah yang bertemu dalam situasi pascakolonial, ketika negara menjalani transisi dari masa jajahan ke merdeka dan terancam oleh isu disintegrasi daerah.

Kata Kunci: ibu kota negara, ruang simbolik, ruang sosial, identitas nasional, identitas kultural

PENDAHULUAN

‘Ibu kota negara’ menjadi perhatian para akademisi, terutama di Indonesia, sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan perpindahan lokasi Ibu Kota Negara Indonesia (selanjutnya disebut IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur pada 26 Agustus 2019. Ibu kota memiliki daya tarik karena bukan ruang publik biasa. Ibu kota setidaknya memiliki tiga dimensi, yakni sebagai entitas sosial politik, ekonomi (pusat produksi dan distribusi barang dan jasa), dan simbolik (Paquet, 1993). Dimensi tersebut juga termuat

dalam tiga tujuan utama IKN Nusantara, yakni sebagai ‘Kota Berkelanjutan’ di dunia, penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, dan simbol identitas nasional (Nusantara, 2023).

Dua tujuan pertama IKN sudah banyak dibahas, terutama terkait persoalan hukum, tata pemerintahan, pembangunan ekonomi, lingkungan, dan perencanaan wilayah.¹

¹ Antara lain: studi Khusna & Restuningdiah (The Influence of Capital City Redeployment's Announcement on Abnormal Return and Trading Volume Activity of



Pembahasan tersebut merupakan respons dari alasan pemilihan lokasi yang disampaikan oleh Kementerian PPN/ Bappenas (Silalahi, 2019), antara lain daya dukung dan daya tampung ruang kota dalam berbagai aspek kehidupan, pertumbuhan ekonomi, kerentanan terhadap bencana, dan isu lingkungan lainnya.

Tujuan IKN yang ketiga, simbol identitas nasional, sepintas lalu saja tersampaikan dalam berita-berita pendek media massa² berupa kutipan pernyataan Presiden Jokowi yang mengasosiasikan rencana relokasi IKN ke Kalimantan pada gagasan Presiden Soekarno. Namun, pembahasan mengenai gagasan Soekarno, secara spesifik ke Palangka Raya, terlebih landasan pemikiran yang melatarbelakangi gagasan tersebut belum menjelaskan dan kurang menjadi perhatian akademisi. Padahal, diskusi tersebut penting untuk memahami perspektif historis gagasan yang menjadi rujukan pemerintahan selanjutnya.

Persoalan IKN Indonesia di era Soekarno setidaknya telah disinggung keempat penulis berikut. Kusno (2000) mengkaji perkembangan politik perkotaan sejak masa kolonial hingga pascakolonial melalui arsitektur dan tata ruang yang menjadi representasi negara. Sebuah bab khusus menjelaskan imajinasi politik Soekarno yang berada dalam persimpangan modernisme dan tradisionalisme guna membentuk ulang Jakarta dari identitas kolonial menjadi nasional. Juga berfokus pada Jakarta, Fakih (2005) membahas

pembangunannya sebagai ibu kota negara melalui alam budaya Soekarno dan konteks sosial politik negara. Berbeda dengan dua karya sebelumnya, Wijanarka (2006) menjadikan Palangka Raya sebagai lokus kajian dengan fokus pada pembahasan teknis rencana desain ibu kota negara yang didorong oleh keinginan untuk membangun sebuah simbol kesatuan dan keberdaulatan negara yang baru, lepas dari pengaruh kolonial. Terakhir, Nugroho, Jati, Dukarno, & Herdiansyah (2023) melihat benang merah gagasan relokasi IKN para presiden RI dari masa ke masa yang berfungsi sebagai etalase politik dan bertujuan untuk diakui dunia internasional. Secara khusus, para penulis menyimpulkan bahwa Soekarno menggagas IKN ke Palangka Raya untuk membangun identitas baru dan perekat daerah Jawa dan luar Jawa.

Keempat artikel tersebut menempatkan IKN tidak sekadar sebagai tempat kedudukan pemerintahan, tetapi juga sebagai simbol identitas nasional yang memuat ide atau kepentingan di belakangnya. Artikel-artikel tersebut berargumen bahwa pembangunan ataupun relokasi IKN oleh Soekarno memuat visi dekolonisasi melalui pembangunan berciri modern. Lebih lanjut, kedua artikel pertama dengan fokus Jakarta menunjukkan modernisasi masih terjebak pada paradigma tata ruang kolonial dengan melanjutkan peminggiran kaum miskin kota.

Sebagaimana karya-karya sebelumnya, artikel ini juga menempatkan IKN sebagai ruang simbolik yang mula-mula tercipta dari ide pencetusnya. Bedanya, artikel ini juga berfokus pada Palangka Raya sebagai lokus diskusi. Selain itu, artikel ini tidak memposisikan aktor tunggal sebagai satu-satunya faktor penyebab kemunculan sebuah ide, tetapi turut mempertimbangkan keberadaan aktor lain dan momentum yang menyokongnya.

Oleh karena itu, artikel ini mempertanyakan bagaimana negara (elite) ingin merepresentasikan ruang ibu kota dan dalam kondisi seperti apa gagasan tersebut mengemuka? Permasalahan tersebut didiskusikan dengan asumsi bahwa ibu kota negara itu bersifat idiosinkratik yang memuat atau mencerminkan gagasan atau imajinasi dari pemimpin pencetusnya, dalam hal ini Presiden Soekarno sebagai elite pusat dan gubernur

the LQ-45 Companies, 2020); Manan & Suprayitno (Preliminary Overview of Several Capital Relocations in Relationship with a Plan of Indonesian Capital Relocation, 2020); Farida (Indonesia's Capital City Relocation: A Perspective of Regional Planning, 2021); Saputra, Gabriel J., & Halkis (Analisis Strategi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Pertahanan (Studi Kasus Upaya Pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara), 2021); Purnama & Chotib (Analisis Kebijakan Publik Pemindahan Ibu Kota Negara, 2022); Sa'adah, Hayyat, & Fevria (Analisis Issue dalam Etika Lingkungan Terkait IKN, 2022); Syaban & Appiah-Opoku (Building Indonesia's New Capital City: An In-Depth Analysis of Prospects and Challenges from Current Capital City of Jakarta to Kalimantan, 2023).

2 Lihat: Kaltim (Pemindahan IKN Wujudkan Mimpi Presiden Soekarno, Soeharto, dan SBY, 2022); Ayundari (Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara, 2022); Arief (Jokowi: Proyek IKN Gagasan Soekarno, Tujuannya Pemerintahan, 2023); Rosaline (Saat Jokowi Tegaskan Pindah ke IKN adalah Gagasan Bung Karno, 2023).

definitif pertama Kalimantan Tengah Tjilik Riwut sebagai elite daerah. Momentum berupa konteks sosial politik negara dan daerah merupakan fondasi dari gagasan mengemuka pada 1950an, masa yang disebut para sejarawan sebagai masa transisi (Bemmelen & Raben, 2011). Indonesia pada periode ini setidaknya berada dalam dua situasi, yakni pembentukan identitas negara-bangsa di dekade awal pengakuan kedaulatan dan masa pergolakan daerah.

METODE

Artikel ini merupakan studi sejarah kota yang menempatkan kota sebagai ruang simbolik. Menurunkan konsepsi Henri Lefebvre yang memaknai kota tidak hanya sebagai ruang geografis tetapi juga ruang sosial hasil hubungan sosial yang kompleks, artikel ini menggunakan konsep 'social spaces' yang disampaikan oleh Evers dan Korff (2002) sebagai konsep utama dalam memahami gagasan dan alasan relokasi IKN ke Palangka Raya pada era Presiden Soekarno. Konsep tersebut berasumsi bahwa kota merupakan hasil produksi simbolik dan politik melalui kekuasaan dan ideologi politik. Proses pembangunan kota adalah imaji dari rezim politik nasional (juga daerah) yang berlanjut pada perjuangan antara aktor yang berbeda dalam konstruksi simbolis ruang melalui ibu kota. Karenanya, artikel ini berfokus pada relasi antara situasi sosial politik, baik nasional maupun tempatan, dengan alam budaya kedua elite utama, yakni Soekarno dan Tjilik Riwut untuk menalar imajinasi mereka atas gagasan relokasi IKN ke Palangka Raya.

WACANA MEMINDAHKAN IBU KOTA DI ERA 1950AN

Gagasan untuk membangun sebuah ibu kota negara yang baru telah lama mengemuka dalam sejarah Indonesia. Sejak awal abad ke-20, pemerintah kolonial menggulirkan ide mengenai pemindahan ibu kota dari Batavia ke Bandung untuk menciptakan lingkungan yang modern, sehat, dan layak huni, terutama bagi masyarakat Eropa. Wacana pemindahan dipicu oleh hasil penelitian Hendrik Freerk Tillema, seorang

apoteker, yang mengungkap bahwa daerah pesisir Pulau Jawa, khususnya Batavia, kurang tepat menjadi pusat pemerintahan dan permukiman karena kondisi iklim yang panas serta maraknya penyakit seperti malaria dan kolera. Kondisi ini dinilai berdampak buruk terhadap kesehatan dan produktivitas orang Eropa sehingga mengancam keuntungan ekonomi bagi pemerintah kolonial. Batavia, ibu kota sejak era VOC hingga pemerintahan kolonial Belanda, terkenal sebagai 'kuburan massal' akibat wabah malaria sehingga memunculkan solusi ide pemindahan ibu kota ke Bandung yang memiliki iklim lebih sejuk (Tillema, 1922: vii-xxvii).

Setelah Indonesia merdeka, lembaran baru terbuka dalam perjalanan bangsa ini untuk mendefinisikan dirinya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Salah satu manifestasi dari semangat kemerdekaan tersebut adalah ide untuk membangun sebuah ibu kota baru yang mampu merefleksikan identitas nasional yang baru, bebas dari bayang-bayang kolonialisme. Pada tahun 1947, Soekarno, sebagai presiden pertama Indonesia, membentuk Panitia Agung dengan tugas mencari lokasi yang cocok untuk menjadi pusat pemerintahan baru. Kriteria yang ditetapkan untuk ibu kota masa depan mencerminkan perubahan orientasi yang signifikan, yakni harus memiliki posisi strategis, mudah dijangkau dari segala arah, dan memiliki sanitasi serta udara yang sehat. Namun, lebih dari itu, ada syarat fundamental yang menegaskan identitas dekolonisasi bangsa ini, yaitu harus bebas dari warisan kolonial.

Proses pemilihan ibu kota baru ini bukan sekadar tentang memenuhi kebutuhan fisik atau estetika semata, tetapi juga tentang bagaimana membangun simbol negara yang baru, yang murni hasil karya anak bangsa, sebagai penegasan terhadap identitas nasional yang lepas dari pengaruh dan kekuasaan imperialisme. Ide pembangunan ibu kota baru ini mencerminkan keinginan kuat untuk melakukan dekolonisasi tidak hanya secara politik dan ekonomi, tetapi juga dalam segi fisik dan simbolik. Harapan untuk memiliki ibu kota yang baru, yang dibangun dengan kemampuan dan sumber daya sendiri, menjadi simbol dari kemandirian dan kemajuan

sebagai bangsa yang baru merdeka. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya lebih luas dalam proses dekolonisasi, di mana bangsa Indonesia berusaha untuk menghapus jejak kolonial dan menggantinya dengan identitas baru yang dibangun atas dasar nilai, cita-cita, dan kearifan lokal. Ini adalah wujud nyata dari semangat untuk menentukan masa depan sendiri, dengan cara yang mencerminkan kedaulatan penuh dan kebanggaan nasional.

Wacana memindahkan ibu kota direspons antusias oleh kota-kota di Indonesia. Media massa nasional memuat berita kota-kota yang menawarkan diri atau dianggap pantas menjadi ibu kota baru. Bandung menawarkan diri untuk menjadi ibu kota baru karena memiliki konsep arsitektur yang dirancang oleh Institut Teknologi Bandung (ITB), didukung dengan iklim yang sejuk, dan tanah yang masih tersedia luas dan gedung pemerintahan yang sudah ada di Bandung (Harian Indonesia, 24 Maret 1950).



Gambar 1. Pemberitaan media massa tentang calon ibu kota baru

Sumber: *Harian Indonesia*, 24 Maret 1950; *Pantjawarna*, April-Mei 1954

Selain Bandung, kota lain yang ditawarkan oleh media nasional sebagai ibu kota Indonesia yakni Malang (Pantjawarna, April 1954) dan Magelang (Pantjawarna, Mei 1954). Dua kota tersebut dianggap memenuhi kriteria yang lengkap dari sisi infrastruktur, sejarah dan budaya, serta cuaca yang sejuk dan sehat hampir mirip dengan kriteria yang ditentukan oleh Panitia Agung di awal kemerdekaan. Dari sisi infrastruktur, Malang sudah memiliki bandara udara Abdurachman Saleh, jalan raya yang menghubungkan Malang dan Surabaya. Kota tersebut juga memiliki sejarah panjang dari kerajaan Singosari dan Kediri. Kota Malang juga memiliki hawa yang sehat dan dianggap akan menjaga kesehatan pemimpin negara.

Sementara itu, menurut ulasan *Pantjawarna*, Magelang dianggap pantas menjadi ibu kota negara karena merupakan pusat kebudayaan dan memiliki sejarah panjang pahlawan terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Sebagai pusat kebudayaan dan keagamaan di mana Candi Borobudur berada, Magelang diulas redaksi karena dekat dengan pusat kebudayaan Jawa yakni Yogyakarta dan Surakarta. Sebagai

kota perjuangan, Magelang menjadi tempat persinggahan Pangeran Diponegoro sebelum ditangkap dan diasingkan ke Makassar. Selain itu, Magelang dianggap sebagai tempat yang sesuai untuk menjadi pusat pemerintahan karena hawanya sejuk dan tenang sehingga pemimpin negara dapat berpikir dengan jernih dalam menyusun kebijakan (Pantjawarna, Mei 1954).

Pembahasan mengenai relokasi ibu kota negara semakin serius sehingga menjadi salah satu agenda Musyawarah Nasional yang diadakan oleh Perdana Menteri Juanda. Musyawarah yang utamanya membahas persoalan keseimbangan pembangunan antara pusat dan daerah, pembentukan Dewan Perancang Nasional untuk menyusun kebijakan ekonomi, serta pembebasan Irian Barat, juga mengemukakan urgensi pemindahan ibu kota dari Jakarta selain membentuk “simbol baru” negara adalah untuk menetralisasi hubungan pusat dan daerah yang sedang memanas. Musyawarah juga merumuskan persyaratan lain dalam penentuan relokasi ibu kota, yaitu kekuatan keuangan ekonomi negara, aspek kesejarahan, posisi strategis, tata kota, psikologi kota seperti mengakomodasi

ketenangan berpikir, dan perlunya dibentuk panitia khusus dalam persiapan pemindahan ibu kota (Merdeka, 21 September 1957).

Wacana tentang ide pemindahan ibu kota ke Kalimantan juga menjadi perhatian elite politik, seperti Semaun. Diduga dalam kapasitasnya sebagai penasihat bidang ekonomi Soekarno, Semaun kerap berdiskusi dengan Soekarno dan rekan partai politiknya untuk mengajukan pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Dalam pemikiran sosialisme, Semaun³ yang kala itu ditengarai merupakan berpendapat tentang pentingnya penyebaran penduduk dan pembukaan lahan hutan Kalimantan untuk menghilangkan orientasi pembangunan yang bersifat 'Jawasentrisme.' Menurut Semaun, semangat pemerataan tersebut akan turut membangun 'jiwa baru' di Kalimantan sebagaimana yang tertulis dalam bukunya, berikut (Semaun, 1957; Wardaya, 2001).

“Di tanah-tanah baru itu Negara (Pemerintah) kita akan dapat membangun berdjuta-djuta rumah dengan pekarangan untuk keluarga rakyat dari daerah padat penduduknya, yang akan bisa menjadi buruh di perkebunan-perkebunan Negara itu, dan juga untuk alat-alat negara mulai tentara polisi, lurah, dan lain-lain semuanya serba baru, serta buruh dan pegawai perusahaan industri Negara yang baru pula... pendeknya kesemuanya sumber rezeki rakyat ditangan negara, sehingga segala keuntungan kelebihan rezeki bagi rakyat pemindahan baru itu akan dapat dikumpulkan ditangan

negara untuk mengembalikan (membayar hutang) pinjaman jangka panjang dari Bank Kesyahjataan Dunia (Semaun, 1957).



Gambar 2. Semaun dan Soekarno sedang berdiskusi
Sumber: Semaun, 1957.

ANTARA PUSAT DAN DAERAH: POLITIK INDONESIA 1950AN

Ide memindahkan ibu kota Indonesia ke Palangka Raya pada era Soekarno muncul dalam konteks historis dan politik yang kompleks pada periode 1950an, era dinamika demokrasi yang ditandai oleh penyesuaian diri dengan realitas sosial-politik Indonesia pascakolonial. Vickers (2008) menggambarkan periode tahun 1950an sebagai masa penuh harapan, di mana para pemimpin politik Indonesia berupaya meyakinkan masyarakat tentang datangnya era baru kesejahteraan dan kesetaraan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Ini adalah masa di mana ide-ide progresif seperti antifeodalisme, antikolonialisme, dan modernitas sejajar dengan Barat, bersama dengan harapan akan mobilitas sosial, mendominasi narasi politik. Surat kabar nasional dipenuhi dengan retorika optimisme yang menggambarkan ambisi Indonesia untuk bangkit dan mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju lainnya.

Fakih (2021) juga turut menambah dimensi baru dalam pemahaman tentang periode ini dengan menyoroti munculnya kelas manajerial baru yang terdiri atas individu terdidik di universitas dan militer. Kehadiran kelas manajerial baru ini kemudian menjadi kekuatan penggerak utama dalam pemerintahan Orde Baru. Kelas manajerial baru ini didorong oleh bantuan luar negeri yang masif yang memainkan peran kunci dalam mendorong pembangunan dan kontrol pemerintah, termasuk dalam mendukung

3 Semaun adalah seorang politisi senior yang pernah menjadi ketua Partai Komunis Indonesia pada tahun 1921 dan pada 1923 hidup di pengasingan di Belanda dan Rusia selama hampir 30 tahun. Ia pernah aktif sebagai pimpinan lembaga perancang negara Tajikistan. Tahun 1953 atas inisiatif Iwa Kusumasumantri kepada Soekarno agar membantu membujuk pemerintah Uni Soviet untuk mengizinkan Semaun dapat kembali ke Indonesia. Terlepas dari kepentingan politik PKI untuk merebut suara pemilih Masyumi yang unggul di wilayah Kalimantan Selatan, Semaun menduduki posisi penting, seperti menjadi anggota Badan Pengawas Aparatur Negara, pengajar ekonomi di Universitas Padjadjaran, dan ditengarai juga menjadi penasihat Soekarno karena dia paham tentang ekonomi dan Eropa Timur. Semaun menuangkan gagasannya dalam buku yang berjudul *Konsepsi Perekonomian Dunia Atas Dasar Kodrat Alam*.

pembangunan ibu kota baru sebagai “simbol baru” bagi negara yang baru merdeka.

Pada 1950 mulai muncul pergolakan daerah terhadap Jakarta yang dianggap sebagai representasi dari pemerintah pusat seperti isu yang kerap muncul yakni tentang pemerataan pembangunan, konflik militer, dan konflik antaretnis yang membutuhkan ruang baru (provinsi baru) sebagai aktualisasi keberadaannya. Selain itu, pada periode tersebut muncul sentimen Jawasentris karena sebagian besar jabatan gubernur diberikan kepada elite Jawa (Raben, 2011).

Eskalasi sentimen menghasilkan pergolakan daerah berupa gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatra Tengah, Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) di Sulawesi, dan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/ TII) di Aceh, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Peristiwa tersebut memicu mundurnya Kabinet Ali Sastroamidjojo pada 1957 dan ketidakstabilan kabinet yang kemudian mendorong teretusnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan diterapkannya sistem Demokrasi Terpimpin (Klinken, 2011).

Pendekatan militer tidak serta merta menghentikan pergolakan daerah sehingga mendorong pemerintah pusat untuk menggunakan pendekatan lain, yakni dengan membentuk provinsi-provinsi baru. Pada awal 1950, Indonesia hanya meliputi sepuluh provinsi dan satu daerah istimewa. Jumlah provinsi meningkat menjadi duapuluh pada akhir dekade 1950an (Legge, 1963).⁴

Jalan ke luar pemerintah pusat yang dalam narasi sejarah Indonesia disebut dengan “integrasi nasional” tersebut dinilai Klinken (2011: 162) sebagai tindakan *state-building* (pembentukan

negara) ketimbang *nation-building* (pembentukan bangsa). Tindakan ini terbatas pada pembentukan administrasi pemerintahan yang dibentuk berdasarkan pertimbangan agama dan identitas budaya. Identitas, seperti tradisi dan etnisitas, merupakan wacana yang kerap digunakan dalam negosiasi antara pemerintah pusat dan elite lokal. Hal ini ditunjukkan oleh berbagai kasus pada 1950an, seperti pemekaran Provinsi Sunda Kecil menjadi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Dukarno, 2013). Sementara itu, bagi elite tempatan penting kiranya memperoleh aliran dana dari pemerintah pusat, selain mendapatkan posisi dalam pemerintahan ataupun posisi strategis lainnya (Klinken, 2006: 46).

Hal itu juga berlaku pada pembentukan provinsi Indonesia yang paling bersifat etnis, Kalimantan Tengah. Keinginan⁵ sekelompok komunitas Dayak untuk memiliki daerah otonom sejak sebelum Indonesia merdeka tercapai melalui negosiasi elite lokal loyalis Soekarno dan serangkaian aksi hasil konsolidasi dengan berbagai komponen komunitasnya. Adalah Tjilik Riwut⁶ dinilai sebagai konseptor dan mediator kepentingan lokal dan nasional. Dia dianggap memiliki kemampuan diplomasi untuk mempengaruhi keputusan pemerintah pusat agar mengabulkan pengajuan ‘ruang otonom,’ yaitu Provinsi Kalimantan Tengah kepada Dewan

4 Indonesia pada tahun 1950 meliputi Provinsi Sumatra Utara, Sumatra Tengah, dan Sumatra Selatan, Provinsi Borneo, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi, Provinsi Maluku, dan Provinsi Sunda Kecil, serta Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahun akhir 1960an jumlah provinsi menjadi bertambah, Provinsi Kalimantan pecah menjadi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah, Aceh menjadi provinsi sendiri berpisah dari Provinsi Sumatra Utara, Provinsi Sumatra Tengah menjadi Jambi, Riau, dan Sumatra Barat, Provinsi Sunda Kecil menjadi Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

5 Keinginan ini merupakan kelanjutan dari apa yang sudah dirintis sejak masa Pergerakan Nasional oleh berbagai organisasi yang dibentuk oleh kaum muda intelektual Dayak, seperti Sarekat Dayak, Komite Kesedaran Bangsa Dayak, dan Pakat Dayak. Pendidikan dan lingkungan pergaulan kelompok kelas menengah perkotaan di luar kelompok, antara lain di Banjarmasin, Jawa, dan Sulawesi mempengaruhi kesadaran komunal mereka. Secara umum, organisasi tersebut bertujuan membangun persatuan identitas bersama, meningkatkan derajat kehidupan, dan mengajukan perwakilannya di Dewan Rakyat (*Volksraad*) (Listiana, 2019). Kesadaran tersebut terutama muncul karena selama ini masyarakat Dayak berada dalam ruang yang didominasi oleh etnik Banjar di wilayah Kalimantan Selatan (Klinken, 2011).

Pada pasca-kemerdekaan, melalui badan permusyawaratan Daerah Federasi Republik Indonesia Serikat (*Bijeenkomst voor Federaal Overleg*) (Suan, 2003; Rusan, et al., 2006), R. Cyrillus Kersanegara, wakil komunitas Dayak di Dewan Dayak Besar dan DPR RIS menuntut daerah administratif sendiri (Klinken, 2011).

6 Keterlibatan Riwut dalam Soeara Pakat memberi warna tersendiri karena ia tumbuh dalam pengaruh nasionalisme Indonesia di Jakarta sejak menempuh sekolah perawat di Purwakarta.

Perwakilan Rakyat RI setelah sebelumnya ditolak melalui UU Darurat No. 25 Tahun 1956 (Laksono, dkk., 2006: 1-25;58). Ketika pemerintah pusat tidak mengindahkan aspirasi otonomi teritori Dayak yang meluas pascapembubaran RIS tahun 1950an (Riwut, 1958: 100-122),⁷ Riwut (beserta rekan seperjuangan) terus mengadakan pendekatan personal dengan retorika sebagaimana yang dikisahnya pada Dies Natalis Universitas Palangka Raya pada 1984, berikut.

“Saya waktu itu berbisik pada Bapak (Milono). Jangan Pak, jangan menentang kaum kami. Ini orang-orang Kalimantan Tengah sudah ada di sini 6.000 orang. Mereka ini punya macam-macam pengetahuan. Mereka bisa menghilang? Bisa saya bilang. Bisa begini? Bisa. Lebih baik Bapak setuju saja mendirikan Kalimantan Tengah itu. Akhirnya ia bikin surat, menyetujui pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah” (Laksono, dkk., 2006: 57).



Gambar 3. Relasi Soekarno dan Tjilik Riwut semakin dekat pascakemerdekaan, setelah Riwut ditugaskan memimpin pasukan payung MN1001, kampanye keindonesiaan di area selatan Kalimantan.

Sumber: Laksono, dkk., 2006: 62.

⁷ Puluhan organisasi yang menyampaikan mosi untuk mendesak pembentukan daerah otonomi bagi komunitas Dayak, antara lain Ikatan Keluarga Dayak, Penyalur Hasrat Rakyat Kalimantan Tengah, Serikat Kaharingan Dajak Indonesia, Partai Nasionalis Indonesia, Partai Rakyat Nasional, Persatuan Pemuda Pemuda Kristen Indonesia Pedoman Besar, Pipakatan Basosial, hingga Persatuan Suku Kalimantan Indonesia. Organisasi tersebut dipimpin oleh tokoh-tokoh elite Dayak yang sudah aktif sejak masa Pergerakan Nasional, seperti Mahir Mahar dan J.M. Nahan (Riwut, 1958, pp. 100-122).

Selain diplomasi, negosiasi elite lokal juga berbentuk gerakan kelompok bersenjata, seperti Gerakan Mandau Talawang Pancasila yang dimotori oleh Christian Simbar, sekretaris wedana Buntok di hulu Sungai Barito, untuk menghadirkan kesan destabilisasi sebagai protes pada pemerintah pusat. Gerakan yang mengaku bukan separatis ini secara spekulatif diberitakan berhubungan dengan aktivisme politik diplomasi Riwut dkk. (Klinken, 2006: 37-40; Laksono, dkk., 2006: 53).

Di sisi lain, menurut Klinken (2011), pemerintah pusat, dalam hal ini Soekarno merespons para elite lokal tersebut melalui aksi teatrikal untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih mendapatkan kesetiaan daerah nun jauh dari pusat gerakan Republikan. Salah satu aksi teatrikal ditunjukkan Soekarno ketika ia tidak menaiki tandu yang disiapkan oleh masyarakat untuk kembali ke tempat istirahat setelah upacara selamat datang *manetek pantan*. Soekarno mengajak seluruh masyarakat mengusung tandu bersama-sama setelah kursinya ditancapkan bendera merah putih (Laksono, dkk., 2006: 63-64; Riwut, 1958: 162-174).

Hal ini dapat disimpulkan dari pernyataan Soekarno pada pemancangan tiang pertama pembangunan Kota Palangka Raya, kala itu masih disebut Pahandut pada 17 Juli 1957. Kunjungan Soekarno ke daerah terpencil yang bisa dilalui dengan menggunakan kapal dari Banjarmasin menempuh perjalanan sekitar 24 jam untuk menuju lokasi. Daerah tersebut kemudian diubah namanya menjadi Palangka Raya. Dalam pidatonya peresmian Soekarno menyakinkan rakyat Kalimantan Tengah yang mayoritas adalah suku Dayak seperti yang diberitakan oleh *Antara*:

“Bahwa banyak daerah di Indonesia ingin memisahkan diri dari negara Republik Indonesia dan bahwa Republik Indonesia telah pecah-pecah, bahkan ada yang mengatakan sudah tidak ada lagi. Apakah rakyat daerah ingin memisahkan diri dari negara Republik Indonesia? Banyak hadirin yang serentak menyatakan tidak!

(Antara, 21 Juli 1957).

Soekarno ingin menakutkan kepada publik tidak hanya nasional tetapi juga internasional, dengan turut sertanya beberapa media seperti Reuter, Tass, Hsinhua, ABC, dan Vrij Nederland, bahwa Indonesia masih ada dan hadir pada pemerintah daerah yang berada di tengah rimba raya Kalimantan. Selain jurnalis, warga internasional yang turut menyaksikan prosesi tersebut adalah duta besar Amerika Serikat dan Uni Soviet, Hugh Cumming Jr. dan D.A. Zukov (Suan, 2003: 33-34).

GAGASAN ELITE TENTANG IBU KOTA PALANGKA RAYA

Palangka Raya dan Imaji Paradoks Soekarno

Imaji Soekarno mengenai ibu kota negara dipicu oleh seri muhibahnya ke negara-negara Barat seperti Amerika Serikat, Kanada, Jerman Barat, dan Swiss pada 1956. Perjalanan ini membuka perspektif Soekarno bahwa Indonesia meskipun negara yang baru merdeka perlu memiliki kota yang modern agar dapat sejajar dengan bangsa Barat (Santoso, dkk., 2015; National Geographic Indonesia, 11 Juni 2019).

Soekarno membayangkan sebuah ibu kota Indonesia merdeka sebagai pusat kekuasaan dan kepemimpinan. Hal tersebut ia sampaikan setelah kembali dari Yogyakarta dan memulai pemerintahan di Jakarta, Soekarno berpidato melalui radio tentang impian ibu kota yang diinginkannya.

“Tidak ada negara-bangsa yang dapat berlangsung lama tanpa koordinasi. Tidak ada negara-bangsa yang dapat eksis tanpa sentralisme. Rusia punya Moskow, Amerika mempunyai Washington, Inggris mempunyai London, Majapahit mempunyai Wilwo Tikto” (Leclerc, 1993).

Dari pernyataan tersebut Soekarno memiliki visi kosmopolitan. Ia membayangkan ibu kota Indonesia haruslah kuat seperti Rusia, Amerika, Inggris dan mencoba mencari akar dalam konteks sejarah untuk dijadikan identitas yakni Majapahit dengan ibu kotanya Wilwo Tikto yang dianggap berhasil menyatukan Nusantara sebelum datangnya kekuasaan kolonial. Dengan

ibu kota yang kuat tentu diharapkan Indonesia akan menjadi negara yang sejajar dengan Barat dan memiliki kisah yang sama seperti Majapahit. Ia memiliki visi bahwa ibu kota negara adalah representasi dari sebuah negara dan sekaligus dapat meningkatkan kepercayaan diri rakyat Indonesia agar sejajar dengan bangsa lain.

“Lihatlah New York dan Moskow, lihatlah ibu kota negara manapun, Timur maupun Barat, dan kamu akan selalu menemukan pusat-pusat kebesaran bangsa dalam bentuk dan bahan bangunan, yang bisa dibanggakan” (Leclerc, 1993).

Soekarno juga memberikan imajinasi politik dan membayangkan ibu kota yang akan dibangun memiliki nilai solidaritas internasional sebagai gerakan pembebasan yang dapat menginspirasi negara-negara di Asia-Afrika dan menjadi kekuatan baru di antara Barat dan Timur. Visi politik ini sangat menarik dan menakutkan rakyat Indonesia dengan harapan-harapan besar akan kesejahteraan yang akan tiba dan Soekarno secara sengaja menyusun mimpi ini sebagai jawaban dari tantangan zaman 1950an.

Palangka Raya mulai menarik minat Soekarno setelah wacana tentang pemindahan ibu kota negara ke daerah baru dan agak lebih masuk ke pedalaman membuat Soekarno tertarik. Ia berpikir Indonesia perlu simbol baru. Inspirasi ini muncul ketika periode pertengahan 1950an hingga awal 1960an, Brasil memindahkan ibu kota Rio De Janeiro yang lebih dekat ke pesisir ke daerah pedalaman yakni Brasillia. Sementara itu, Pakistan memindahkan ibu kotanya dari kota pelabuhan Karachi ke Islamabad daerah yang berada di tengah negara tersebut (Silver, 2008).

Pada era Presiden Soekarno, ide untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Palangka Raya di Kalimantan Tengah mencerminkan visi yang didorong oleh keinginan untuk membangun sebuah simbol kesatuan dan keberdaulatan negara yang baru, terlepas dari pengaruh kolonial. Konsep ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi permasalahan fisik yang dihadapi oleh Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga sebagai strategi untuk mendistribusikan ulang kekuatan

politik dan ekonomi secara lebih merata di seluruh negeri. Soekarno memandang Jakarta, yang telah dirancang oleh kolonial Belanda untuk menampung setengah juta penduduk dan tumbuh menjadi salah satu megapolitan di dunia sebagai lambang dari kekuatan kolonial yang ingin ia putus. Visi ini mencerminkan cita-cita Soekarno untuk menciptakan Indonesia yang merdeka secara penuh, tidak hanya dari segi politik tetapi juga dalam pengaturan geografis dan sosial negara (Wijanarka, 2006).

Gagasan tersebut tetap menjadi bagian penting dari sejarah perencanaan urban di Indonesia, yang mengingatkan pada aspirasi untuk pembangunan yang lebih inklusif dan desentralisasi kekuasaan (Salim & Kombaitan, 2009). Dalam konteks pembangunan periode 1950an, Kusno (2000) memberikan wawasan tentang bagaimana Soekarno memvisualisasikan negara baru melalui lensa pembangunan bangsa (*national building*) dan perancangan ibu kota negara yang modern sebagai kota yang antikolonial. Ini menggarisbawahi bahwa pembentukan negara baru memerlukan nilai-nilai baru, dan ibu kota baru dianggap sebagai manifestasi fisik dari sebuah bangsa yang merdeka dan terlepas dari penjajahan masa lalu.⁸

Beberapa media nasional dan internasional yang memuat berita kunjungan Soekarno ke Kalimantan Tengah seperti *Antara* (21 Juli 1957) dan koran berbahasa Belanda *Java Bode*

(23 Juli 1957) tidak menyebutkan narasi tentang Palangka Raya yang akan menjadi ibu kota Indonesia. Berita yang muncul pada harian tersebut menggambarkan tentang permasalahan daerah dan Indonesia masih tetap utuh sebagai sebuah bangsa. Adapun kedatangan Soekarno pada penancapan tiang pertama sebagai penanda pembangunan Kota Palangka Raya merupakan wujud dukungan. Namun demikian, pada prosesi tersebut, Soekarno sudah berorasi di depan rakyat Kalimantan Tengah bahwa Palangka Raya itu istimewa karena akan dibangun dari hutan tanpa ada warisan kolonialisme sehingga mungkin menjadi ibu kota Republik Indonesia. Terlepas dari motif di balik orasinya, Soekarno telah menyampaikan ide menjadikan Palangka Raya sebagai ibu kota negara pada prosesi 17 Juli 1957 tersebut (Laksono, dkk., 2006: 62), bahkan ketika Dewan Nasional selaku perencana pemindahan ibu kota negara belum dibentuk.



Gambar 4. Prosesi Pemancangan Tiang Pertama Pembangunan Kota Palangka Raya. (kiri) Soekarno

⁸ Gagasan soal pemindahan ibu kota hingga masa Presiden Soekarno tak kunjung terwujud. Penyebabnya, menurut Guntur (Kompas, 18 Februari 2022), rencana pemindahan tidak berhasil karena alasan geologis tanah gambut tidak cukup kuat untuk menopang gedung-gedung pencakar langit. Biaya yang dibutuhkan untuk membangun gedung di atas lahan gambut sangat besar untuk ukuran Indonesia pada 1950an. Faktor selanjutnya, dukungan politik dan komitmen terhadap rencana tersebut. Presiden Soekarno tidak serius mewujudkan rencana tersebut yang ditunjukkannya pada pidato Dirgahayu Jakarta ke-437 pada 22 Juni 1964. Ia menyatakan bahwa Jakarta adalah kota bersejarah seperti pembacaan naskah proklamasi, kota revolusioner, dan fasilitas sebagai kota internasional sudah ada sejak dibangunnya proyek mercusuar menyambut ASEAN Games (Setiyono, 2017). Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1964 tentang pernyataan Daerah Ibu Kota Khusus Jakarta Raya tetap sebagai ibu kota negara Republik Indonesia tertutuplah wacana pemindahan ibu kota ke daerah lain sesuai yang dijelaskan pada bagian umum undang-undang tersebut.

menimbun tanah ke tiang pancang pertama; (kanan) Soekarno duduk bersama Ir. Pg. Moh. Noor (Menteri PU, gubernur pertama Kalimantan) dan Gubernur Kalimantan Milono dan istri (ujung kanan dan kiri).

Sumber: Suan, 2003, p. 35; Riwut, 1958, p. 133.

Pada momen pemancangan tiang pertama, menurut Riwut (1958: 169-170), Bung Karno memaklumkan “perang terhadap alam” di beberapa lokasi, seperti berikut: “Marilah, kita tundukkan alam... Marilah kita buat berpaedah bagi manusia dari apa jang merupakan alam ini....” Maklumat yang direspons tepuk sorai oleh masyarakat itu, menurut Riwut dalam pidato peringatan Kota Palangka Raya ke-6, dimaksudkan Soekarno sebagai usaha “melenyapkan sisa-sisa penjajahan, merombak semua ketidakadilan, menghilangkan keadaan yang tidak seimbang.” Riwut lanjut memaknai bahwa membangun Palangka Raya merupakan ‘Revolusi Pembangunan’ yang tidak didasarkan pada pembangunan di atas tempat atau kota yang sudah ada, seperti di Kuala Kapuas, di Sampit, di Muara Teweh atau tempat lain. Kota Palangka Raya harus bebas dari sisa-sisa pembangunan penjajah dengan suasana pedalaman yang suci dari pengaruh paham atau aliran yang merusak (Suan, 2003: 132).

Pemaknaan Riwut mengenai visi antikolonialisme Soekarno sejalan dengan telaah Fakih (2005: 3, 123-132) terhadap alam budaya Soekarno dalam pembangunan Jakarta sebagai ibu kota negara. Tidak untuk menilai penggunaan metafora alam untuk kolonialisme, Fakih menunjukkan bahwa Soekarno sesungguhnya memang mendamba kota yang sepenuhnya baru, bukan seperti Jakarta yang merupakan kelanjutan dari sejarah Batavia. Soekarno menilai bahwa sebagai ibu kota negara, Jakarta hadir dalam bentukan pemerintah kolonial Belanda. Jakarta adalah kota kolonial dan Jakarta adalah ibu kota dari negara kolonial.

Visi antikolonialisme, antiimperialisme, dan nasionalisme Soekarno, yang menurut Abidin Kusno (dalam Fakih, 2005: xxv), menempatkan Indonesia bukan sebagai warisan nenek moyang, melainkan proyek kolektif yang membutuhkan upaya juga dipahami Riwut. Hal tersebut disampaikan Riwut dengan melabeli pembangunan Palangka Raya sebagai Revolusi

Pembangunan yang “dibangun kembali (oleh) pribadi rakyat... dalam rangka (menegakkan) pribadi nasional bangsa Indonesia, perasaan harga bangsa Indonesia” (Suan, 2003: 132).

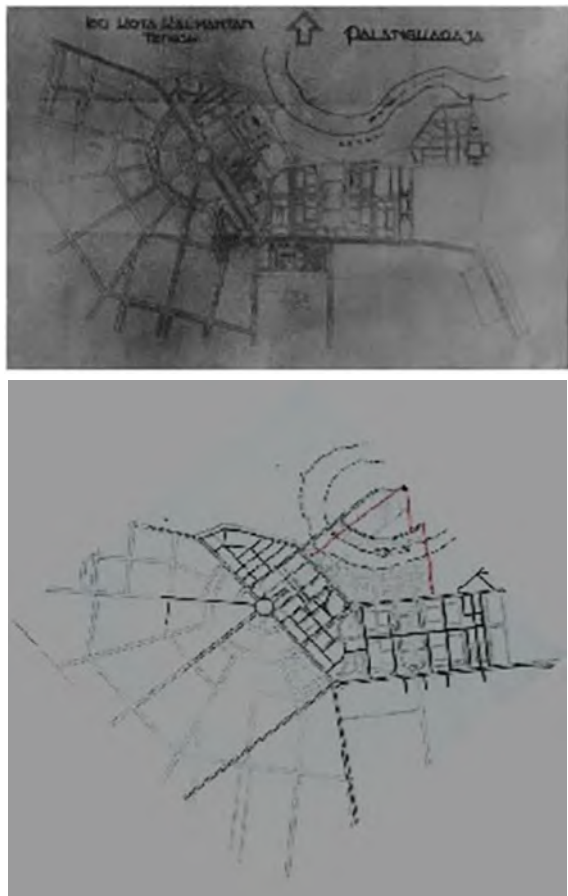
Selain visi ‘antikolonialisme,’ Soekarno berpemahaman bahwa arsitektur dan perencanaan kota dapat mewujudkan masyarakat yang ideal. Bangunan merupakan esensi dari kepercayaan dan kebanggaan sebuah bangsa, namun bukan bangunan lama yang merepresentasikan kekuasaan masa lalu. Soekarno menghendaki bangunan baru, bangunan yang modern dalam merepresentasi negara merdeka. Dengan demikian, bangunan dilihat sebagai perwujudan dari ide nasionalisme dan kehebatan bangsa (Fakih, 2021: 50-51, 123-132).

Pemahaman Soekarno tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Soemarno Sosroatmodjo pada upacara peresmian Kotapraja Palangka Raya 17 Juni 1965. Dalam pidatonya, Sosroatmodjo menggagas Palangka Raya untuk dibangun sebagai kota modern berdasarkan perencanaan tata kota yang baik (Suan, 2003: 53). Visi modernitas kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Riwut melalui peran Soekarno dalam memimpin perencanaan kota, termasuk keputusan bentuk bangunan yang harus melalui konsultasi dan persetujuan kepala negara. Wewenang tersebut khususnya pada rencana bangunan-bangunan penting, seperti rumah gubernuran, meskipun penentuan dan pelaksanaannya dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU). Sebagai contoh, Riwut menjelaskan bahwa gambar gedung rumah kediaman Gubernur mengalami perubahan setelah mendapat pemeriksaan dari pusat (Suan, 2003: 30-33).⁹

Maka dari itu, tidak heran jika Riwut diberitakan kerap berkunjung ke Jakarta untuk menemui Soekarno. Tjilik Riwut sendiri menyatakan bahwa “pembangunan Palangka Raya adalah perpaduan rencana nasional, dari otak

9 Menteri PU juga diberi wewenang merencanakan bangunan pelengkap lain, seperti perumahan pegawai, pusat niaga, pusat seni budaya dan pendidikan, ataupun pusat industri. Sementara desain gambar dibikin oleh Jawatan Tata Kota dan Tata Daerah dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan juga dari kami selaku Gubernur, yang oleh Pusat juga dianggap perlu untuk keselarasan dengan kepribadian daerah.

nasional, dari Presiden dan menteri-menterinya serta pemikir-pemikir lainnya... dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan daerah.” Desain Kota Palangka Raya yang diajukan kepada Soekarno dan disepakati sebagai master plan pembangunan memiliki ciri modernis. Sketsa konsep sarang laba-laba (*spider concept*) berikut diadopsi dari kota-kota tua di Eropa. Akan tetapi, tidak seluruh konsep tersebut dapat direalisasikan, khususnya jaring-jaring melingkar yang berpusat pada bundaran besar (Wijanarka, 2003; Suan, 2003).



Gambar 5. (kiri) rencana awal *spider concept* tahun 1957; (kanan) perbandingan rencana tahun 1957 berupa garis samar-samar dan realisasi hingga 2002 berupa garis tegas
Sumber: Suan, 2003: 32-33.

Gambaran mekanisme pembangunan Kota Palangka Raya dapat menguatkan pendapat (Fakih, 2005) bahwa dalam konteks politik 1950an, rancangan urban Soekarno merupakan bagian dari cara memperkuat rezim otoriternya, sebagai bagian dari perencanaan politis yang

lebih besar. Dari sisi kedaulatan bernegara, hal tersebut merupakan upaya untuk mendapatkan pengakuan dari negara luar bahwa Indonesia telah berhasil lepas dari identitas sebagai negara terjajah. Dari sisi legitimasi bagi rakyat Indonesia, upaya Soekarno dapat dijelaskan menggunakan pemahaman ruang dalam budaya Jawa. Pembangunan Palangka Raya sebagai ibu kota negara yang baru dapat dimaknai sebagai keraton baru yang akan memancarkan sebuah mandala baru yang kesaktiannya akan menyinari seluruh daerah kekuasaannya.

Palangka Raya sebagai Rumah Betang:¹⁰ ***Imaji Tjilik Riwut***



Gambar 6. Tugu Dewan Nasional, penanda penetapan Palangka Raya sebagai calon Ibu Kota Negara.
Sumber: Dokumentasi Darmadi, 2024.

Gambar di atas adalah Tugu Dewan Nasional, tugu penanda pusat lokasi calon ibu kota baru yang diresmikan pada 1958 oleh Roeslan Abdulgani sebagai wakil ketua Dewan Nasional (Keputusan Presiden No. 158, 1957) atas instruksi Presiden Soekarno. Abdulgani menerangkan bahwa tugu tersebut diresmikan setelah seluruh anggota Dewan Nasional menyetujui gagasan Tjilik Riwut, sebagai anggota Dewan Nasional perwakilan Kalimantan, untuk memindahkan ibu kota negara ke Palangka Raya. Abdulgani

¹⁰ Judul ini mengutip dari Laksono, et al. (Pergulatan Identitas Dayak dan Indonesia: Belajar dari Tjilik Riwut, 2006, p. 74).

menjelaskan bahwa Riwut mengajukan Palangka Raya sebagai kota yang baru dibangun untuk ibu kota baru karena posisi geografisnya berada di tengah Indonesia dan (masih) bebas dari pengaruh kekuatan asing. Pemikiran dan argumentasi Riwut tersebut dinilai visioner dan mengandung motivasi persatuan Indonesia sehingga membuat Soekarno tercengang sekaligus teryakinkan dan respek (Kelana, 2004a; 2004b). Selain itu, A.A. Baramuli sebagai anggota Dewan Nasional perwakilan Sulawesi (Keputusan Presiden No. 95, 1958) menambahkan pertimbangan lain yang diajukan Riwut adalah kondisi Palangka Raya berupa daerah yang bebas dan bisa dibangun secara modern (Kelana, 2004b).

Sebagaimana kesaksian Abdulgani dan Baramuli, secara formal Riwut merupakan penggagas pemindahan ibu kota negara ke Palangka Raya dalam forum Dewan Nasional. Riwut dikenal sebagai Soekarno yang bahkan sejak awal periode kemerdekaan telah menetapkan kesetiannya pada Republik Indonesia. Bersama keenam rekannya, Tjilik Riwut bersumpah setia untuk Pemerintah Republik Indonesia di halaman Istana Kepresidenan Yogyakarta, Gedung Agung pada 17 Desember 1946. Sumpah secara adat yang disebut mewakili 142 suku Dayak tersebut dilaksanakan di hadapan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, dan para menteri termasuk Ir. Pangeran Mohammad Noor, Gubernur Kalimantan saat itu, serta Panglima Besar APRI Jendral Soedirman juga para pejabat tinggi sipil dan militer lain. Riwut juga menjadi pemimpin operasi Penerjunan Pasukan Payung M.N. 1001 untuk kampanye Indonesia pada masa 'Revolusi Indonesia.' Di periode tersebut, Riwut memilih garis perjuangan sebagai 'Republikan,' ketika rekan Dayak lainnya juga terus berusaha memperjuangkan Negeri Dayak yang otonom pada Konferensi Malino bersama badan permusyawaratan daerah-daerah federal RIS. Riwut mengartikulasi kepentingan lokal dalam wacana nasional dengan memobilisasi modal lokal (Laksono, dkk., 2006; Suan, 2003; Klinken, 2006: 31).

Sebagai loyalis, Riwut mengikuti gaya Soekarno dalam membangun ide persatuan Indonesia di daerahnya, seperti membentuk slogan

dan mitos-mitos integratif menggunakan simbol tertentu. Seperti Soekarno yang memberikan gelar pada kota yang dibangunnya,¹¹ Riwut juga memberi slogan "Palangka Raya sebagai Kota Modal dan Model." Dalam pidato memperingati HUT Palangka Raya ke-7 pada 17 Juli 1963, Riwut menyampaikan bahwa kota 'modal' adalah kota yang diperoleh dari perjuangan dan untuk meneruskan perjuangan dari yang tiada sampai menjadi ada. Dalam bayangan Riwut, kota yang hendak dibangunnya merupakan pedalaman yang suci, di atas kepribadian dan martabat rakyat Kalimantan Tengah dan dibangun menjadi besar dan mulia, sebagaimana penamaan kota 'Palangka' dan 'Raya.' Menurutnya, kota ini jauh dari pengaruh paham dan aliran yang merusak serta bebas dari sisa-sisa zaman kolonial Belanda. Lokasi yang masih berupa hutan ini menjadi modal Riwut bernegosiasi dengan pemerintah pusat yang masih giat menggelorakan semangat nasionalisme. Bahkan, pembangunan Palangka Raya pun dinilainya sebagai kehormatan nasional melalui doa restu dan komando Presiden Republik Indonesia, yang kala itu disebut Riwut sebagai Pemimpin Besar Revolusi. Adapun kota 'model' yang dimaksud adalah kota teladan atau contoh bagi kota lain di Indonesia, termasuk dari tata kotanya yang modern sebagaimana yang diarahkan Presiden Soekarno (Suan, 2003: 29-33, 52-54; 132-133; Riwut, 1958: 132).

Adapun simbol yang kerap diungkapkan Riwut untuk menunjukkan keterikatan Palangka Raya dengan Indonesia adalah angka 17. Waktu kelahiran Palangka Raya, 17 Juli, dianggap istimewa karena memiliki unsur angka 17 seperti tanggal kemerdekaan Indonesia. Hal yang mula-mula diungkap oleh Gubernur Milono dalam pidato peresmian terpilihnya Kampung Pahandut sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah sekaligus pemberian nama baru Palangka Raya. Pidato yang ditengarai buatan Riwut tersebut merinci keterhubungan tersebut kemudian kerap disampaikan Riwut dengan menambah deretan keterhubungan lain, yakni Provinsi Kalimantan Tengah adalah provinsi ke-17; dilahirkan oleh Kabinet Karya sebagai kabinet ke-17; Pahandut kampung asal Kota Palangka Raya merupakan

¹¹ Jakarta diberi gelar sebagai Kota Indoktrinasi, Kota Teladan, dan Kota Cita-Cita (Fakih, 2005, p. 5).

kampung yang ke-17 dari Kuala Kapuas, ibu kota Kabupaten Kapuas dan kampung ke-17 dari Muara Sungai Kahayan; pemancangan tiang pertama pembangunan kota pada tanggal 17 Juli 1957; dan Palangka Raya resmi menjadi kotapraja otonom pada tanggal 17 Juni 1965 (Riwut, 1958: 132; Laksono, dkk., 2006: 56; Suan, 2003: 12).

Pembangunan Palangka Raya yang menjadi gagasan Riwut sesungguhnya bersifat etnis, yakni dengan mengonsepsikan kota sebagai rumah betang. Rumah betang bukan hanya rumah utama, tempat bernaung dan tumbuh bersama dalam hidup sehari-hari, melainkan juga jantung dari struktur sosial komunitas Dayak. Di dalam rumah betang, kehidupan individu dan masyarakat diatur melalui kesepakatan bersama yang tertuang dalam hukum adat. Dengan demikian, nilai utama dari rumah betang adalah kebersamaan, yang memuat unsur solidaritas dan toleransi, merupakan konsep dari gagasan pembangunan kota ala Riwut (Laksono, dkk., 2006: 74-79)

Pertimbangan etnisitas mula-mula ditunjukkan oleh ditolaknya usul Riwut menjadikan Sampit sebagai lokasi ibu kota karena majelis adat menilai pilihannya tidak mencerminkan pusat budaya Dayak. Pahandut dipilih karena wilayah ini lebih merepresentasikan budaya Dayak. Selanjutnya, etnisitas secara lisan disampaikan melalui konsep kebersamaan ketika menjelaskan kota modal yang satu komponennya adalah 'modal permulaan,' yakni modal asal dari milik bersama seluruh Kalimantan Tengah, bukan modal milik segelintir orang (Suan, 2003: 131).

Praktik dari konsep tersebut setidaknya tercermin dari gotong royong yang disebut sebagai jiwa pembangunan kota. Gotong royong dalam keluarga sebagaimana yang berlaku di rumah betang ditunjukkan oleh solidaritas masyarakat saat mempersiapkan hidangan makan bagi rombongan tamu saat pemancangan tiang pertama. Situasi Palangka Raya, saat itu masih Pahandut, masih berupa hutan belantara namun harus menyiapkan jamuan bukan hanya ratusan orang tapi ribuan (Riwut, 1958).

“Pakai apa kita kasih makan mereka? Orang Pahandut hanya beberapa ratus saja. Beras dari mana? Tuhan mengatur kami berpikir.

Ayo kamu cari beras, satu sama lain perintah mudik cari beras, bawa 3 karung. Dapat 6 karung beras. Itu modal untuk kasih makan paduka-paduka tuan ini....” (Laksono, dkk., 2006: 65).

Gotong royong melibatkan semua komponen warga terus berlanjut dalam tahap pembangunan kota. Sebagaimana kisah kerja bakti menebas lahan yang turut melibatkan para veteran, tentara, pegawai pemerintah, dan para pelajar ketika pembangunan lapangan terbang. Gambaran tersebut juga berlaku seperti dalam pembangunan jalan, gedung sekolah, dan fasilitas air minum sehingga pembangunan yang semula direncanakan tiga tahun dapat diselesaikan dalam waktu 2 tahun (Suan, 2003: 40-41). Nilai kebersamaan tersebut digambarkan dalam tujuan akhir pembangunan kota melalui sebuah puisi karya Riwut berikut.

*“Jadikanlah hutan menjadi kota
Membangun Kota Palangka Raya
Sebagai tantangan pada Pendjadjahan Belanda
Mari bekerja bersemangat baja
Palangka Raya harus jadi
Untuk kebahagiaan anak cucu kita”*
(Laksono, dkk: 2006: 74).

SIMPULAN

Ide untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Palangka Raya pada tahun 1950an dapat dilihat sebagai bagian dari upaya serupa untuk memutus hubungan dengan masa kolonial dan menciptakan representasi baru tentang negara dan identitasnya. Jakarta yang sebelumnya dikenal dengan Batavia serta merupakan representasi dari pusat pemerintahan kolonial Hindia Belanda sejak awal periode dekolonial di Indonesia sejak medio 1940an dianggap sebagai simbol dari penjajahan dan ketidakadilan sosial. Palangka Raya di Kalimantan kemudian diusulkan sebagai lokasi ibu kota baru supaya dapat menyeimbangkan kembali pembangunan di Indonesia dan menegaskan kembali identitas nasional yang terlepas dari bekas pusat kolonial. Meskipun rencana ini akhirnya tidak terwujud, ide tersebut mencerminkan pemikiran yang lebih luas

dalam konteks dekolonisasi, di mana pemilihan dan pembangunan ulang ruang urban berfungsi sebagai media untuk menegaskan kedaulatan, membangun identitas baru, dan mengatasi warisan kolonial. Keadaan ini juga menunjukkan bagaimana keputusan terkait dengan urbanisme dan perencanaan kota tidak hanya mencerminkan kebutuhan fisik, tetapi juga keinginan kolektif untuk mendefinisikan kembali identitas nasional dalam era pascakolonial. ide memindahkan ibu kota di era 1950an, menggambarkan bagaimana periode ini menjadi titik balik penting dalam sejarah politik dan sosial Indonesia dalam merumuskan identitas nasionalnya sendiri.

Terwujudnya gagasan relokasi disebabkan oleh ruang negosiasi antara pemerintah pusat dalam elite lokal. Elite lokal yang aktif bernegosiasi dengan pemerintah pusat adalah loyalis Soekarno yang terbukti memiliki kemampuan jalur perjuangan fisik dan diplomatik. Ia mampu mengartikulasi modal lokal dalam wacana nasional sehingga gagasannya lebih diterima oleh pemerintah pusat. Ia mampu menerjemahkan konsepsi ruang imajinasi Soekarno dan mendialogkannya dalam nilai tempatan. Di sisi lain, Soekarno juga memerlukan loyalis yang mampu memastikan perangkat negara ada di Kalimantan Tengah dalam menjaga ketertiban. Secara umum, proses pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan bentuk bertemunya kepentingan elite lokal dan pemerintah pusat dalam sebuah proses membangun struktur negara

PUSTAKA ACUAN

- Antara. (21 Juli 1957).
- Arief, A. M. (2023, 22). *Jokowi: Proyek IKN Gagasan Soekarno, Tujuannya Pemerataan*. Retrieved from Katadata.co.id: <https://katadata.co.id/amp/berita/nasional/63f5e61c7008e/jokowi-proyek-ikn-gagasan-soekarno-tujuannya-pemerataan>
- Ayundari. (2022, Januari 25). *Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara*. Retrieved from Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html>
- Bemmelen, S. v., & Raben, R. (2011). Sejarah Daerah Tahun 1950-an dan Dekonstruksi Narasi Besar Integrasi Nasional. In S. v. Bemmelen, & R. R. (Eds.), *Antara Daerah dan Negara: Indonesia Tahun 1950-an* (pp. 1-17). Jakarta: YOI-KITLV.
- Benda, H. J. (1964). Review Article Democracy in Indonesia. *The Association for Asian Studies* 23(3), 449 - 456.
- Darmadi, Y. (2024). Tugu Dewan Nasional. *Dokumentasi Pamong Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan XIII*. Palangka Raya.
- Dukarno, P. D. (2013). Sunda Kecil Pascakolonial: Desentralisasi Wilayah dan Pembentukan Identitas. In *Maarif Fellowship 2013*. Jakarta: MAARIF Institute.
- Evers, H.-D., & Korff, R. (2002). *Urbanisme di Asia Tenggara: Makna dan Kekuasaan dalam Ruang-Ruang Sosial*. Jakarta: YOI.
- Fakih, F. (2005). *Membayangkan Ibu kota Jakarta di Bawah Soekarno*. Yogyakarta: Ombak.
- Fakih, F. (2005). *Membayangkan Ibu Kota Jakarta di Bawah Soekarno*. Yogyakarta: Ombak.
- Fakih, F. (2021). *Authoritarian Modernization in Indonesia's Early Independence Period The Foundation of the New Order State (1950–1965)*. Leiden-Boston: Brill.
- Farida. (2021). Indonesia's Capital City Relocation: A Perspective of Regional Planning. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 9(3), 221-234.
- Farida. (2021). Indonesia's Capital City Relocation: A Perspective of Regional Planning. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 9(3), 221-234.
- Feith, H. (2007). *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Jakarta: First Equinox Edition.
- Harian Indonesia. (24 Maret 1950).
- Java Bode. (23 Juli 1957).
- Kaltim, s. (2022, Januari 24). *Pemindahan IKN Wujudkan Mimpi Presiden Soekarno, Soeharto, dan SBY*. Retrieved from Website Resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur: <https://www.kaltimprov.go.id/berita/pemindahan-ikn-wujudkan-mimpi-presiden-soekarno-soeharto-dan-sby>
- Kelana, A. (Producer), & Kelana, A. (Writer). (2004a). *17 Tahun Mengenang Wafatnya Tjilik Riwut* [Motion Picture]. Retrieved April 2024, from pabry21: <https://www.youtube.com/watch?v=sLn4hihmM1g>
- Kelana, A. (Producer), & Kelana, A. (Writer). (2004b). *17 Tahun Mengenang Wafatnya Tjilik Riwut*

- [Motion Picture]. Retrieved September 14, 2022, from Diar Anwar Corner: <https://www.youtube.com/watch?v=XWRE74JwxcA>
- Keputusan Presiden No. 158, Pembentukan Dewan Nasional (Juli 11, 1957).
- Keputusan Presiden No. 95, Pemberhentian dengan hormat Dahlan Ranumihardjo; Andi Mappan-juki sebagai Anggota Dewan Nasional untuk Pemuda; dan Mengangkat Arnold Baramuli sebagai Anggota Dewan Nasional untuk Sulawesi (April 11, 1958).
- Khusna, N., & Restuningdiah, N. (2020). The Influence of Capital City Redeployment's Announcement on Abnormal Return and Trading Volume Activity of the LQ-45 Companies. *Advances in Economics, Business and Management Research* 173, 353-368.
- Klinken, G. v. (2006). Colonizing Borneo: State-Building and Ethnicity in Central Kalimantan. *Indonesia, Apr., No. 81*, 23-49.
- Klinken, G. v. (2011). Mengkolonisasi Borneo: Pembentukan Provinsi Dayak di Kalimantan. In S. v. Bemmelen, & R. R. (Eds.), *Antara Daerah dan Negara: Indonesia Tahun 1950-an. Pembongkaran Narasi Besar Integrasi Bangsa* (pp. 161-195). Jakarta: YOI.
- Kompas. (18 Februari 2022).
- Kusno, A. (2000). *Behind the Postcolonial: Architecture, Urban Space and Political Cultures in Indonesia*. New York: Routledge.
- Laksono, P., Sonjaya, J. A., Untoro, O., Subagya, Y. T., Rianty, A., & Hendrijani, A. (2006). *Pergulatan Identitas Dayak dan Indonesia: Belajar dari Tjilik Riwut*. Yogyakarta: Galangpress-PSAP UGM.
- Leclerc, J. (1993). Mirrors and Lighthouse: A Search for Meaning in the Monuments and Great Works of Soekarno's Jakarta, 1960-1965. In P. J. Nas, *Urban Symbolism*. Leiden: EJ. Brill.
- Legge, .. D. (1963). *Central Authority and Regional Autonomy in Indonesia: A Study in Local Administration 1950-1960*. Ithaca: Cornell University Press.
- Listiana, D. (2019). Satu Dayak dan Menjadi Indonesia-Dayak: Impian Persatuan Bangsa dalam Soeara Pakat Terbitan Banjarmasin pada Tahun 1940an. In *Penguatan dan Pelemahan Persatuan Bangsa: Media dan Tokoh di Kalimantan Selatan (1923-1959)* (pp. 27-64). Bandung: Media Jaya Abadi-BPNB Kalimantan.
- Listiana, D. (2019). Satu Dayak dan Menjadi Indonesia-Dayak: Impian Persatuan Bangsa dalam Soeara Pakat Terbitan Banjarmasin Pada 1940an. In *Penguatan dan Pelemahan Persatuan Bangsa: Media dan Tokoh di Kalimantan Selatan* (pp. 27-64). Bandung: Media Jaya Abadi.
- Manan, A. M., & Suprayitno, H. (2020). Preliminary Overview of Several Capital Relocations in Relationship with a Plan of Indonesian Capital Relocation. *Journal of Infrastructure and Facility Asset Management* 2(1), 73-90.
- Merdeka. (21 September 1957).
- National Geographic Indonesia. (11 Juni 2019).
- Nugroho, Y., Jati, W. R., Dukarno, P. D., & Herdiansyah, I. A. (2023). Nusantara, A Historical Perspective. In J. M. Lau, A. N. Alami, S. D. Negara, & Y. N. (Eds.), *The Road to Nusantara: Process, Challenges, and Opportunities* (pp. 11-31). Singapore: ISEAS – Yusof Ishak Institute/ National Research and Innovation Agency (BRIN).
- Nusantara, I. K. (2023). *Menuju Visi Indonesia 2045: Kota Dunia untuk Semua*. Retrieved from Nusantara: <https://ikn.go.id/>
- Pantjawarna. (April 1954).
- Pantjawarna. (Mei 1954).
- Paquet, G. (1993). Commentary: Capital Cities as Symbolic Resources. In J. J. Taylor, *Capital Cities/ Les Capitales* (pp. 271-285). Montreal: Mc Gill-Queen's University Press.
- Purnama, S. J., & Chotib. (2022). Analisis Kebijakan Publik Pemindahan Ibu Kota Negara. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 13(2), 155–168.
- Raben, R. (2011). Bangsa, Daerah, dan Ambiguitas Modernitas di Indonesia Tahun 1950-an. In S. v. Bemmelen, & R. R. (Eds.), *Antara Daerah dan Negara: Indonesia Tahun 1950-an. Pembongkaran Narasi Besar Integrasi Bangsa* (pp. 295-315). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Riwut, T. (1958). *Kalimantan Memanggil*. Jakarta: Penerbit Endang.
- Rosaline, C. E. (2023, Februari 23). *Saat Jokowi Tegaskan Pindah ke IKN adalah Gagasan Bung Karno*. Retrieved from Kompas.com: <https://youtu.be/dPabAMSHVxo>
- Rusan, A. S., Widen, K., Usop, K., Lion, E., Rusan, I. S., Lambung, H., . . . Bandrang, C. (2006). *Sejarah Kalimantan Tengah*. Palangka Raya: Pemprov Kalimantan Tengah.
- Sa'adah, N., Hayyat, M. R., & Fevria, R. (2022). Analisis Issue dalam Etika Lingkungan Terkait IKN. *Analisis Issue dalam Etika Lingkungan Terkait IKN: Lestarian Alam Raya dalam Berkarya Melalui Indonesia SDGs Menuju Human Welfare*, 421-4.

- Salim, W., & Kombaitan, B. (2009). Jakarta: The Rise and Challenge of a Capital. *City*, 13(1), 120–128.
- Santoso, A., Cholik, A., Patriasari, B., Mulyaningsih, D., R. Suryagung, S., Sunjaya, S., & Susanti. (2015). *Naskah Sumber Arsip Presiden RI: Soekarno*. (S. K. Yahya, Ed.) Jakarta: Arsip Nasional RI.
- Saputra, S. D., Gabriel J., T., & Halkis, M. (2021). Analisis Strategi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Pertahanan (Studi Kasus Upaya Pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara). *Jurnal Ekonomi Pertahanan* 7(2), 192-220.
- Semaun. (1957). *Konsepsi Perekonomian Dunia Atas Dasar Kodrat Alam*. Jakarta: Garuda Muda.
- Setiyono, B. (2017, September 8). *Sukarno Ingin Ibu-kota Tetap di Jakarta*. Retrieved September 10, 2022, from Historia: <https://historia.id/urban/articles/sukarno-ingin-ibukota-tetap-di-jakarta-vQXAj/page/1>
- Silalahi, P. (2019). *Indonesia Learns from Brazil's Experience in Relocating Its*. Retrieved from Nusantara: <https://ikn.go.id/storage/press-release/2019/en/eng-3-siaran-pers-indonesia-learns-from-brazils-experience-in-relocating-its-capital-city.pdf>
- Silver, C. (2008). *Planning the Megacity: Jakarta in the Twentieth Century*. New York: Routledge.
- Suan, T. (2003). *Sejarah Kota Palangka Raya*. Palangka Raya: BAPPEDA Kota Palangka Raya.
- Syaban, A. S., & Appiah-Opoku, S. (2023). Building Indonesia's New Capital City: An In-Depth Analysis of Prospects and Challenges from Current Capital City of Jakarta to Kalimantan. *Urban, Planning and Transport Research*, 11(1), 1-29.
- Tillema, H. F. (1922). *Kromoblanda: Over 't vraagstuk van het Wonen in Kromo Groote Land*. 's-Gravenhage: H. Uden Masman.
- Vickers, A. (2008). Mengapa Tahun 1950-an Penting Bagi Kajian Indonesia. In H. Schulte-Nordholt, B. Purwanto, & R. S. (Eds.), *Perspektif baru Penulisan Sejarah Indonesia* (pp. 67-78). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan KITLV Jakarta.
- Wardaya, B. T. (2001). *Menuju Demokrasi Politik Indonesia dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- Wijanarka. (2003). Tata Ruang Kota di Kalimantan Tengah dan Palangkaraya. In H. e. (Eds.), *Beberapa Ungkapan Sejarah Penataan Ruang Indonesia 1948-2000*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penataan Ruang.
- Wijanarka. (2006). *Soekarno dan Rencana Desain Ibu Kota RI di Palangkaraya*. Yogyakarta: Ombak.